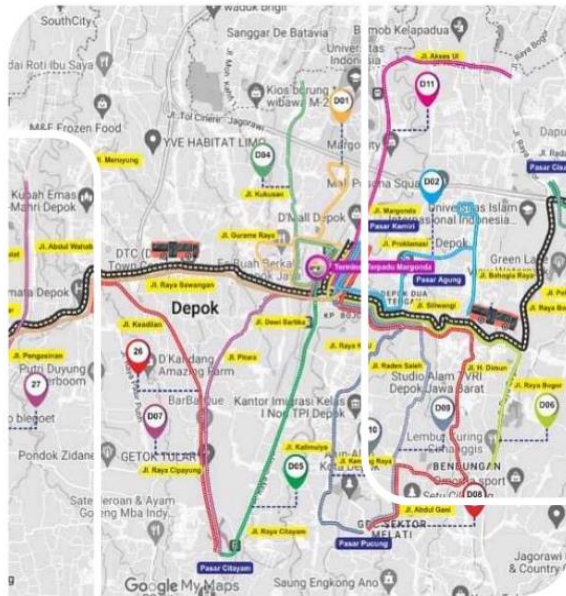
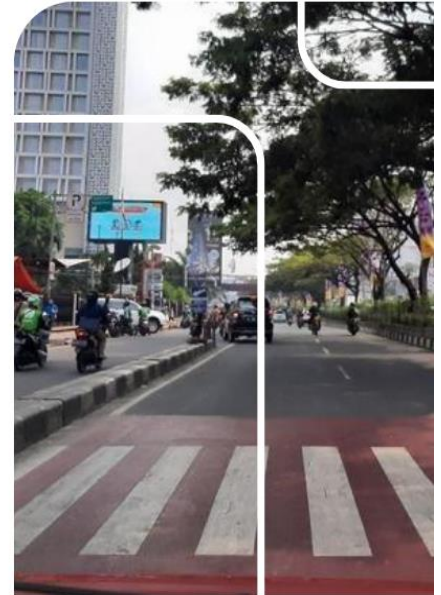




RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

2026



<https://dishub.depok.go.id/> 

021 - 29230770 

Cilodong, Kota Depok 

PEMERINTAH KOTA DEPOK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2026. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok di bidang transportasi.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik berupa saran, data, maupun masukan konstruktif lainnya.

Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja dan pelayanan transportasi di Kota Depok.

Depok, 06 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK**



Drs. ZAMROWI, M.Si
NIP.19660607 198610 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Pelaporan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	18
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	32
2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIP Tahun 2024.....	37
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	45
3.2 Program dan Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	52
4.1 Program dan Kegiatan	52
BAB V PENUTUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor transportasi merupakan urat nadi bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, khususnya kegiatan perekonomian. Suatu daerah tidak mungkin berkembang dan tumbuh secara optimal tanpa adanya dukungan sistem transportasi yang memadai, terencana, dan berkelanjutan. Kota Depok, sebagai salah satu kota yang terletak pada posisi strategis di poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), memiliki daya tarik tinggi sebagai lokasi investasi dan permukiman. Kondisi tersebut mendorong peningkatan mobilitas penduduk yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan transportasi, salah satunya kemacetan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Depok memegang peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi daerah. Instansi ini dituntut mampu meningkatkan kelancaran, ketertiban, dan keselamatan transportasi guna mewujudkan layanan transportasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung implementasi visi Kota Depok yang “Bersama Depok Maju.” Dalam perencanaan maupun penanganannya, transportasi tidak dapat dipandang secara parsial atau sektoral. Sebagaimana fungsi transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah dan kepentingan, penyelenggaraan urusan perhubungan harus dilakukan melalui kolaborasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kewajiban penyusunan Renja Perangkat Daerah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun rencana kerja tahunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renja berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok merupakan penjabaran operasional dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025–2029. Renja Dinas Perhubungan ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKPD Tahun 2026.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada tiga komponen utama, yaitu:

1. Renstra Perangkat Daerah;
2. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan
3. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan antara program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up. Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan, pendekatan teknokratis diterapkan melalui peninjauan menyeluruh terhadap kinerja pembangunan periode sebelumnya, penetapan tolok ukur serta target kinerja keluaran dan hasil, penentuan lokasi serta kelompok sasaran program dan kegiatan, serta perumusan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah berbasis kinerja.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pendekatan politis diwujudkan melalui proses pembahasan dan konsultasi bersama Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pendekatan top-down dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Adapun pendekatan bottom-up dilakukan dengan menghimpun arahan dan masukan dari para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Depok.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Depok menjadi acuan utama dalam penetapan program dan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, guna menilai capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok.

Terkait dengan capaian pelaksanaan program daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan implementasi teknis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan menciptakan keseragaman dan keterpaduan dalam proses perencanaan dan penganggaran di seluruh pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam mewujudkan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta proses penganggaran pada urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui regulasi ini, nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan oleh pemerintah daerah diselaraskan dengan nomenklatur nasional, sehingga mempermudah integrasi, harmonisasi, serta konsolidasi data pembangunan. Upaya tersebut sekaligus menjadi dasar untuk meningkatkan sinergitas perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta antar-pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen rencana kerja.

Selain berfungsi sebagai standar teknis, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 juga mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan agar dapat dilakukan secara lebih terukur, berbasis data, dan konsisten. Dengan adanya kesamaan klasifikasi dan kodifikasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan serta mengoptimalkan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome).

Pada Tahun 2026, penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok telah mengacu sepenuhnya pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut. Hal ini menjadi komitmen Dinas Perhubungan Kota Depok untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan yang disusun tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional maupun daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2026 disusun berlandaskan:

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 21. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
 32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
 33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9).
 34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12);
 35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029;
 36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: (1/6/2020))
 37. Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi UPTD Penerangan Jalan umum Kelas A pada Dinas Perhubungan

38. Peraturan Walikota Depok Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Pengelolaan Terminal Kelas A pada Dinas Perhubungan
39. Peraturan Walikota Depok Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi UPTD Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
41. Peraturan Walikota Depok Nomor 28 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan;
42. Peraturan Walikota Depok Nomor 29 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal Kelas A pada Dinas Perhubungan;
43. Peraturan Walikota Depok Nomor 30 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan;
44. Peraturan Walikota Depok Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
45. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
46. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
47. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421)
48. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menetapkan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif, yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan.

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama Tahun 2026, sekaligus memastikan bahwa seluruh langkah operasional yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk menyediakan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Depok dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2026 secara konsisten dan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang diemban. Selain itu, penyusunan Renja bertujuan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2026, sehingga kontribusi Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok dapat diwujudkan secara optimal, terarah, dan terukur. Renja ini juga menjadi instrumen penting dalam memastikan adanya keselarasan antara rencana strategis, kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAKIP TAHUN SEBELUMNYA, dalam bagian ini diuraikan Rekomendasi LAKIP Tahun sebelumnya oleh Inspektorat Daerah Kota Depok dan hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, berikut tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, berikut tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok merupakan penjabaran perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan selama satu tahun anggaran. Capaian dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja tersebut dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah memenuhi target yang direncanakan.

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi atas keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui suatu mekanisme pelaporan yang dilakukan secara periodik, sehingga dapat memberikan gambaran yang transparan, objektif, dan terukur mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui proses akuntabilitas ini, Dinas Perhubungan Kota Depok diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan/atau realisasi APBD Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Depok pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 3 Program 15 Kegiatan 37 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 106,931,090,934,- (Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp **111,343,637,376,-** (Seratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 dan target pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s.d. Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Depok

Indikator untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan di Tahun 2024 s.d 2026 disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
						Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Realisasi (Tw.I)	Tingkat Capaian (%)	
1	Sasaran 2 : '- Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	100%	98.98%	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	100%	98.98%		100%	25%		25%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%	25%		25%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1	Dokumen	33%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	100%	17 Laporan	5	Laporan	29%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%		100%	100%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang	108 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang	108 Orang	100%	109 Orang	105	Orang	25%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	1	Laporan	25%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	100%		100%	100%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0	0

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	130 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	130 Orang	100%	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%		100%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1	Paket	50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	2	Paket	67%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	21 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100%	100%	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	100%	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	100%		100%	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	45 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	45 Unit	75%	63 Unit	0	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100%	25 Unit	0	0	0

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	50%	3 Unit	0	0	0
	Sasaran 1. : - Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	100%		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	100%						
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi	100%	100%	Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi	100%	100%	100%	100%	100%		
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	0	0	0
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60.59%	60.59%	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60.59%	60.59%		60.59%	60.59%		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	2 unit	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	2 Unit	100%	1 Unit	0	0	0
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	200 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	200 Unit	100%	250 Unit	0	0	0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	10 Unit	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	0	0	0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	66 Unit	66 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	66 Unit	66 Unit	100%	100 Unit	0	0	0
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM	100%	100%	Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM	100%	100%		100%	100%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik kemacetan yang tertangani	60.38%	60.38%	Persentase titik kemacetan yang tertangani	60.38%	60.38%		60.38%	60.38%		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	11 Laporan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	0	0	0
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Andalalin yang diterbitkan	100%	100%	Persentase Andalalin yang diterbitkan	100%	100%		100%	100%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%

		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Load Factor	32%	32%	Load Factor	32%	32%		32%	32%		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3500 Unit	3500 Unit	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3500 Unit	3500 Unit	100%	3500 Unit	0	0	0
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	0.0014	0.0014	Rasio Ijin Trayek	0.0014	0.0014		0.0014	0.0014		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	1	Laporan	50%
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Unit	12 Unit	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	0	0	0
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Orang yang Melalui Terminal Setiap Tahun	5.500.000 Orang	5.500.000 Orang	Jumlah Orang yang Melalui Terminal Setiap Tahun	5.500.000 Orang	5.500.000 Orang		5.500.000 Orang	5.500.000 Orang		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	Unit	100%
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60.59%	60.59%	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60.59%	60.59%		60.59%	60.59%		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	703 Unit	703 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	703 Unit	703 Unit	100%	703 Unit	0	0	0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5.800 Unit	5.800 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5.800 Unit	5.800 Unit	100%	5.800 Unit	1.188	Unit	21%
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum	95%	95%	Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum	95%	95%		95%	95%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	16 Unit	16 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	16 Unit	16 Unit	100%	15 Unit	0	0	0

		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0	0
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	100%	13 Unit	0	0	0
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3	Laporan	25%
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0	0
	Sasaran 1 : - Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Ketersediaan Perencanaan Dan Kebijakan Perkeretaapian	100%		Persentase Ketersediaan Perencanaan Dan Kebijakan Perkeretaapian	100%						
		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Perencanaan Dan Kebijakan Pengelolaan Perkeretaapian	100%		Persentase Ketersediaan Perencanaan Dan Kebijakan Pengelolaan Perkeretaapian	100%						
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0	0

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam peraturan tersebut bahwa Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, termasuk tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Depok menyelenggarakan sejumlah fungsi strategis, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Lalu Lintas;
3. Bidang Angkutan;
4. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka menyusun strategi dan program yang lebih efektif serta berorientasi pada hasil, diperlukan analisis menyeluruh terhadap kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok menunjukkan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan.

Keberhasilan implementasi program-program yang dilaksanakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi sangat ditentukan oleh tingkat komitmen, partisipasi, dan dukungan aktif dari seluruh aparatur negara serta pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergi antara aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan dapat tercapai secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok dilihat dari tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok berdasarkan sasaran/target yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran sebelumnya, pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025-2029. Realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Kota Depok Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok

No	Indikator IKU	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	36,973,038	47,505,862	50,000,000	55,000,000	
2	Rasio Izin Trayek	-	-	0.0022	0.0022	0.0023	0.0024	0.0015	0.0014	0.0015	0.0015	
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	-	-	13,000.00	13,500.00	14,000.00	14,500.00	10,099.00	9,367.00	10,000.00	10,250.00	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Persentase layanan angkutan darat	-	-	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.08%	0.01%	0.02%	0.03%	
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	0.43%	0.42%	0.41%	0.40%	0.43%	0.68%	0.65%	0.62%	
7	Pemasangan Rambu-Rambu	-	-	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.66%	5.78%	65.25%	72.21%	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	0.0012	0.0011	0.0010	0.0010	0.0016	0.0016	0.0015	0.0014	
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	-	-	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	36,973,038	47,505,862	50,000,000	55,000,000	
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	-	-	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	3,241,894	4,589,092	5,000,000	5,500,000	

2.2.1 Pencapaian Kinerja, Kendala serta Upaya Perbaikan Berdasarkan Target Kinerja pada Tahun Sebelumnya

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024 terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang angka realisasinya telah mencapai target yang ditentukan sebagai berikut :

1. V/C Rasio pada Tahun 2024 yang targetnya 0.72 dengan realisasi 0.72 dan capaian 100%,
2. Nilai SAKIP pada Tahun 2024 yang targetnya BB (71) memiliki realisasi BB (71,40), dengan capaian 100,5%.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program guna mencapai IKU dan selanjutnya sasaran strategis ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang memiliki dampak cukup besar, sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran dialokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi. Pajak Penerangan Jalan pun belum maksimal untuk pembiayaan PJU, begitu juga dengan pajak kendaraan bermotor masih sangat minim untuk pengembangan transportasi.
3. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan.
4. Belum optimalnya Integrasi antar moda (kurangnya konektivitas) sehingga dapat mengefisienkan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.
5. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
 - a) Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Tingginya volume lalu lintas tidak sejalan dengan kapasitas jalan yang ada. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan. Tidak bertambahnya kapasitas jalan kemudian bertambahnya hambatan samping seperti parkir di badan jalan, kendaraan yang berhenti di badan jalan dan kendaraan lambat menyebabkan semakin turunnya kinerja suatu jalan.
 - b) Maraknya transportasi online yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup Masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi.
 - c) Transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama

masyarakat. Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

Adapun Isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota Depok adalah :

1. Pembangunan Terminal Terpadu Depok Baru dengan Pola kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) melibatkan Pemerintah Kota Depok dengan Pihak Ketiga
2. Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan. Pengembangan Sistem transportasi Kota Depok difokuskan pada beberapa Aspek penting antara lain :
 - Meningkatkan Keterpaduan antara Tata Guna lahan dan Transportasi (Kota Depok memiliki Strategi Pengembangan Kota yang tertuang dalam Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
 - Pengembangan sistem Transportasi yang Terintegrasi. Pemerintah Kota Depok berupaya merancang sistem transportasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi seperti KRL, LRT, Biskita dengan pola kerjasama BTS (Buy The Service) dan Angkutan Perkotaan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Kemacetan antara lain :
 - Rekayasa Lalu lintas tugu batu sawangan
 - Kajian Redesign Simpang Keadilan sawangan
 - Kajian-kajian jalur alternatif:
 - Jalan Margonda menuju Sawangan
 - Jl. Kartini menuju Pasir Putih
 - Perencanaan Koridor Angkutan umum massal Trayek bojongsari sampai ke terminal Depok
4. Peningkatan Keselamatan lalu lintas dengan berbagai Langkah yang telah dilakukan antara lain : Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Daerah (RAKD), Kolaborasi dengan instansi terkait, Penertiban Parkir Liar, Edukasi Keselamatan Berlalu lintas

baik angkutan jalan maupun angkutan rel.

Pada dasarnya langkah-langkah formulasi isu-isu merupakan identifikasi SWOT. Analisis SWOT mengidentifikasi faktor-faktor Strengths (kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dari/bagi suatu organisasi. Secara singkat metode SWOT metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan kerja baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT.

SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulasi atau proyek yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Proses ini akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

Tabel 2.6. SWOT

	Strength	Weakness
Opportunities	<p>SO</p> <p>Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang</p>	<p>WO</p> <p>Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang</p>
Threats	<p>ST</p> <p>Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang</p>	<p>WT</p> <p>Meminimalkan Kelemahan untuk menghadapi ancaman</p>

Tabel 2.7. Pemetaan SWOT pada Dinas Perhubungan Kota Depok

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Strength (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Perhubungan (Lalu lintas jalan) 2. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Depok untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dalam pelayanan 4. Komitmen untuk melakukan inovasi dalam pelayanan secara berkelanjutan; 5. Adanya renstra dinas perhubungan 	<p>Weakness (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (spesifikasi) perangkat Teknologi Informasi untuk pelayanan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan teknologi; 2. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang terus meningkat baik dari aspek kualitas dan kuantitas; 3. Sumber Daya Manusia belum seluruhnya menguasai perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan; 4. Hasil sosialisasi tentang Peraturan dan Tatatertib dijalan
<p>Oppotunities (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat; 2. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan dilapangan; 3. Semakin tingginya tingkat keselamatan masyarkat dijalan ; 4. Tersedianya Rambu-rambu lalulintas yang memadai 5. Komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata tertib berlalulintas 	<p>Strategi S-O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi peraturan baik di lingkungan internal maupun kepada masyarakat 2. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 3. Menjaln koordinasi dan komunikasi intensif dengan tingkat pusat dan provinsi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 4. Memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kualitasdan kuantitas pelayanan 	<p>Strategi W-O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta mengganti sapras pelayanan yang tidak layak secara bertahap dan memelihara sapras secara berkala 2. Meningkatkan kemampuan SDM untuk para petugas dijalan melalui pelatihan dan diklat-diklat 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang teknologi
<p>Threats (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya keselamatan dijalan; 2. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami perkembangan teknologi informasi; 3. Tingginya angka kecelakaan pengguna jalan; 4. Masih kurangnya jaringan jalan dikota depok; 5. Masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalulintas dijalan; 	<p>Strategi S-T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lingkungan; 2. Mengadakan pelatihan dan/atau diklat untuk para petugas dijalan; 3. Tetap menyediakan layanan langsung bagi masyarakat 4. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana lalulintas; 5. Memperbanyak simpul transportasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat; 	<p>Strategi W-T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat prosedur kerja yang efisien serta menyediakan keamanan system 2. Membuat prosedur terkait pemanfaatan teknologi informasi 3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait

Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Mengacu pada dokumen RPJMD, Visi pembangunan jangka pendek 2025-2029 Kota Depok yang diusung oleh Wali Kota terpilih adalah "*Bersama Depok Maju*" untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 4 (empat) misi. Dinas Perhubungan lebih fokus kepada Misi 2 "*Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan*". Untuk melaksanakan Misi 2 ini, Dinas Perhubungan ditugaskan melaksanakan 2 (dua) Program pada RKPD 2026 sebagaimana telah dilakukan tahapan pemetaan dan pemutakhiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jika dampak pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.8. Indikator Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026
Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Konektivitas dan Akseibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya Efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Kecepatan Rata-Rata	70 (Poin)
		Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	61 (Poin)

Untuk menilai dampak program dan kegiatan Dinas Perhubungan, ada 3 capaian indikator tersebut jika dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel seperti berikut :

Tabel 2.9. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator

No	Indikator Tujuan / Sasaran PD	2021		2022		2023		2024		2025		Satuan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	V/C Ratio	0.79	0.79	0.77	0.77	0.74	0.74	0.72	0.72	0.70		Angka
2	Moda Share	17.10	18.32	18	14.46	18.50	15.91	19.0	18.62	19.50		Angka
3	Nilai Sakip	70	68.50	70.25	69.95	70.50	70.50	71.0	71.40	71.50		Huruf

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Depok yang harus peka dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus mampu mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Kota Depok dan masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, apa yang dilakukan harus mencerminkan program dan kegiatan/sub kegiatan yang lebih responsif, kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pelayanan masyarakat Kota Depok. Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10. Isu Strategis Pada Dinas Perhubungan Kota Depok

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
1.	Infrastruktur jalan terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ruas jalan pendamping 2. Terbatasnya kapasitas jalan dan simpang yang tidak ideal 3. Kondisi ruas jalan alternatif yang ada kurang ideal 4. Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata 5. Perlintasan sebidang 6. Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU
2.	Transportasi publik belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan kota kurang nyaman 2. BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>) dan JRC (<i>Jabodetabel Residence Connection</i>) masih terbatas 3. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum 4. Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
3.	Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. TOD atau hub belum terlaksana 2. Simpul transportasi masih kurang memadai 3. <i>Park and ride</i> belum tersedia 4. Halte belum merata 5. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi 6. <i>First and last mile</i> tidak efisien
4	Pengelolaan Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan parkir di badan jalan belum dilaksanakan secara optimal 2. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki potensial untuk dikembangkan sebagai fasilitasi perparkiran belum dilakukan secara optimal 3. Sebagian besar gedung-gedung belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
5	Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya disiplin dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat 2. Masih banyaknya titik rawan kecelakaan (Blackspot) 3. Belum optimalnya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda 4. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2026 Dinas Perhubungan Kota Depok merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan

partisipatif.

Tidak terdapat perubahan terhadap Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Depok, perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Depok yang disusun berdasarkan dokumen rancangan awal RKPD dan hasil analisa ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
T-C.31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2026
DINAS PERHUBUNGAN
Pemerintah Kota Depok

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PERHUBUNGAN				102,850,275,704.80							
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,682,817,796.00	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,678,444,796.00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	55,711,400.00	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	51,338,400.00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38,591,200.00	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	34,218,200.00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17,120,200.00	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17,120,200.00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	20,226,687,896.00	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	20,226,687,896.00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang	20,207,354,096.00	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang	20,207,354,096.00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 kali	19,333,800.00	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 kali	19,333,800.00	

2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	471,550,000.00	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	471,550,000.00
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	441,950,000.00	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	441,950,000.00
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	29,600,000.00	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	29,600,000.00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	878,815,500.00	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	878,815,500.00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,806,700.00	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,806,700.00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	66,764,000.00	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	66,764,000.00
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	31,454,800.00	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	31,454,800.00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	182,752,000.00	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	182,752,000.00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,040,000.00	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,040,000.00
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	103,250,000.00	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	103,250,000.00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	338,074,000.00	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	338,074,000.00
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	121,674,000.00	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	121,674,000.00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	-	-	211,613,000.00	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	-	-	211,613,000.00

2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	211,613,000.00	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	211,613,000.00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100%	1,306,540,000.00	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100%	1,306,540,000.00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	610,000,000.00	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	610,000,000.00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696,540,000.00	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696,540,000.00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	531,900,000.00	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	531,900,000.00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	214,500,000.00	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	214,500,000.00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	55,430,000.00	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	55,430,000.00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	261,970,000.00	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	261,970,000.00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		58,588,011,350		79,167,457,908.80	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				92,117,255,208.80	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi	100%	200,000,000.00	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi	100%	200,000,000.00	
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000.00	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000.00	

2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	60.59%	3,497,652,800.00	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	60.59%	3,497,652,800.00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	221 Unit	1,318,987,000.00	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	221 Unit	1,318,987,000.00
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	10 Unit	143,475,000.00	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	10 Unit	143,475,000.00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	38 Unit	2,035,190,800.00	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	38 Unit	2,035,190,800.00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM</i>	100%	329,260,000.00	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM</i>	100%	329,260,000.00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Laporan	329,260,000.00	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Laporan	329,260,000.00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase titik kemacetan yang tertangani</i>	60.38 %	12,649,500,800.00	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase titik kemacetan yang tertangani</i>	60.38 %	12,558,500,800.00
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12,633,864,000.00	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12,542,864,000.00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	15,636,800.00	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	15,636,800.00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Load Factor</i>	32%	20,485,921,858.80	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Load Factor</i>	32%	20,485,921,858.80
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Kota Depok,	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan</i>	12 Laporan	155,048,000.00	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan</i>	12 Laporan	155,048,000.00


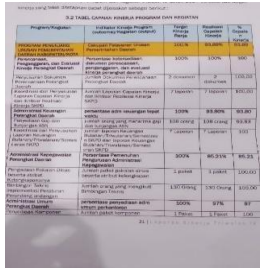


	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cilodong, Jatimulya	<i>Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		<i>Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>		
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	15 Unit	20,330,873,858.80	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	15 Unit	20,330,873,858.80
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Rasio Ijin Trayek</i>	0.0014	377,200,000.00	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Rasio Ijin Trayek</i>	0.0014	377,200,000.00
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	200,000,000.00	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	200,000,000.00
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	12 Unit	177,200,000.00	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	12 Unit	177,200,000.00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Orang yang Melalui Terminal Setiap Tahun</i>	5.500.000 Orang	4,151,017,000.00	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Orang yang Melalui Terminal Setiap Tahun</i>	5.500.000 Orang	4,151,017,000.00
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	1 Unit	4,151,017,000.00	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	1 Unit	4,151,017,000.00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	60.59 %	35,746,591,850.00	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	60.59 %	48,951,657,850.00


2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	600 Unit	9,043,302,000.00	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	600 Unit	22,248,368,000.00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5.800 Unit	26,703,289,850.00	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5.800 Unit	26,703,289,850.00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum	95 %	1,730,313,600.00	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum	95 %	1,566,044,900.00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	23 Unit	243,522,200.00	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	23 Unit	202,441,200.00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	243,522,200.00	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	149,997,500.00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	210,400,000.00	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	210,400,000.00
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	952,869,200.00	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	923,206,200.00
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	80,000,000.00	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	80,000,000.00

2.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAKIP TAHUN 2024

Berdasarkan hasil penilaian LAKIP Dinas Perhubungan Depok Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang mana telah ditindaklanjuti sebagaimana berikut :

TINDAK LANJUT LHE AKIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	Membuat Penjenjangan kinerja dan pohon kinerja serta diagram cascading dan crosscutting berdasarkan peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan menjadikan penjenjangan kinerja, diagram cascading dan crosscutting tersebut sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang	Telah susun pohon kinerja, cascading dan crosscutting sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	
2.	Memanfaatkan data capaian kinerja untuk pencapaian target kinerja	Data capaian kinerja telah digunakan untuk pencapaian target kinerja	
3.	Menambahkan Langkah aksi pada Dokumen rencana Aksi	Langkah aksi telah tertuang dalam Dokumen rencana aksi Tahun 2024	
4.	Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi secara berkala (tri wulanan) dengan menjelaskan capaian target per triwulan, analisis penyebab kegagalan capaian kinerja dan formulasi rekomendasi perbaikan yang tepat untuk memastikan target kinerja akhir tahun dapat tercapai serta tindak lanjut dari rekomendasi dari laporan triwulan sebelumnya dan membuat dokumen pengukuran kinerja yang dilakukan berjenjang pada setiap capaian IKU yang ditandatangani Kepala Dinas	Laporan Monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilakukan dan tertuang dalam dokumen (laporan evaluasi Triwulanan I,II,III dan IV)	

5.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait realisasi capaian kinerja secara kumulatif tahun awal/pertama Renstra hingga tahun dilakukan evaluasi dan dibandingkan juga dengan target akhir / total pada Renstra, memberikan informasi terkait perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional atau dengan pemda lain	Informasi terkait realisasi capain kinerja secara kumulatif telah tertuang dalam Dokumen LKIP Tahun 2024	
----	---	--	---

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan dari masyarakat tersebut diperoleh melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah diselenggarakan dalam rangka memberikan masukan terhadap Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2026 yang mencakup aspek perencanaan anggaran, efektifitas penggunaan anggaran, aspek inovasi pelayanan yang akan dilakukan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dishub Tahun 2025-2029.

Forum Perangkat Daerah Dinas perhubungan Tahun Anggaran 2026 dilakukan online yang dihadiri oleh Wali Kota Depok sebagai pembuka acara, Ketua DPRD Kota Depok, Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Depok, dan Stake Holder dilingkungan Kota Depok. Pada hakikatnya, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan telah diakomodir di dalam renja kerja yang sudah ada, hanya tinggal mengawal program kegiatan dan sub kegiatan secara bersama-sama, sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 2.13. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
Tahun 2026**

URAIAN	KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2					URUSAN PERHUBUNGAN			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Poin
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	persentase administrasi keuangan tepat waktu	Persen
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	Persen
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi umum perkantoran	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	Persen
1	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket

2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Persen
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
1	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Poin
							Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	cakupan integrasi perencanaan transportasi	Persen
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen
					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit

2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPT PJU)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terseleenggaranya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun	orang
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Terminal
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terseleenggaranya tempat parkir yang sesuai dengan peraturan perparkiran	Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM	Persen
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terseleenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persen
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Berkurangnya titik kemacetan di Kota Depok	Persentase titik kemacetan yang tertangani	persen
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesesuaian rekomendasi mitigasi lalulintas yang diterapkan	Persentase Tindak Lanjut Monitoring Evaluasi Implementasi Andalalin	persen

2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum	load factor	persen
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalnya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keterjangkauan layanan angkutan umum	rasio ijin trayek	rasio
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan tema visi Indonesia Emas 2045, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka Kementerian Perhubungan memiliki Visi “*Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045*”. Dalam mendukung visi tersebut Kementerian Perhubungan berpedoman pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunyai 8 misi, yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahandan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi, permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;

3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif;

Sedangkan tujuan Kementerian Perhubungan sesuai Inmendagri No. 2 Tahun 2025 yang terkait dengan tugas Dinas Perhubungan Kota Depok tertuang dalam tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan”.

Dalam tujuan ke-1 tersebut terdapat 2 sasaran yaitu :

1. ***“Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan”***
2. ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola digital”***

Selanjutnya dalam sasaran strategis tersebut telah ditentukan indikator sasaran strategis yaitu :

- a. Nilai atau angka Kecepatan Rata-rata yang diukur dengan Km/Jam
- b. Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

Dengan demikian pelaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Perhubungan di Kota Depok merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendukung terwujudnya misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut.

Kemudian Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, ***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan”*** dengan tujuan Mewujudkan Pelayanan transportasi yang berkelanjutan di Jawa Barat, serta sasaran ***“Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat”***

Merujuk pada sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang ingin meningkatkan aksesibilitas dalam Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Depok juga memilih peningkatan aksesibilitas sebagai strategi meningkatkan pelayanan prima bidang Perhubungan. Adapun sasaran strategi Dinas Perhubungan Kota Depok untuk Rencana Strategis 2025-2029 adalah ***“Meningkatkan efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan”***

Kemudian arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Transportasi umum yang inklusif secara merata ke seluruh wilayah kota yaitu :
 - Peningkatan layanan angkutan umum
 - Optimalisasi rencana angkutan umum masal

- Peningkatan layanan terminal
 - Peningkatan layanan Pengujian kendaraan bermotor
 - Pengembangan dan Penataan jaringan Trayek
 - Penyediaan layanan angkutan feeder
 - Penyediaan fasilitas park and ride
 - Peningkatan dan pengembangan simpul transportasi
 - pengusulan subsidi untuk pengembangan angkutan umum
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian di wilayah Barat dan Timur
 3. Pembangunan dan perluasan coverage sarana - prasarana pelayanan transportasi Publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabotabek yaitu :
 - Peningkatan efisiensi energi
 - Penggunaan Transportasi massal Berkelanjutan
 - Kerjasama antar Daerah dan Stakeholders terkait (swasta)
 4. Penataan Kelembagaan yang adaptif dan Pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan
 - Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkantoran
 - Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang layanan Dinas Perhubungan
 5. Meningkatkan layanan pengaduan melalui SIMDISHUB dan layanan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N Lapor

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025–2029 telah sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan sebagai kementerian yang membidangi Urusan Bidang Perhubungan dan telah sesuai juga dengan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas

mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai hubungan fungsional dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong jika ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kemenhub dan Rentsra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1) Faktor Penghambat

- a. Kinerja ruas jalan masih rendah akibat kapasitas jalan kurang memadai, kapasitas simpang dengan radius tikung kurang memadai, banyaknya hambatan samping seperti banyaknya angkot dan ojol yang parkir di badan jalan, pk1 di trotoar dan bahu jalan.
- b. Tidak seimbang pertambahan jumlah kendaraan dengan penambahan ruas jalan baru.
- c. Pembangunan tol baru yang mengakibatkan kemacetan di ruas jalan keluar tol yang disebabkan kondisi jalan belum mendukung.
- d. Belum memadainya fasilitas parkir (*park and ride*).
- e. Prioritas anggaran untuk pengembangan angkutan masih sangat minim. Penggunaan pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan jalan belum maksimal untuk pengembangan transportasi
- f. Kesadaran masyarakat akan tertib dan keselamatan lalu lintas masih minim.
- g. Angkutan kota kurang nyaman.
- h. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum.
- i. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana.
- j. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi
- k. Feeder angkutan umum belum tersedia
- l. Masih minimnya minat swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi
- m. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah
- n. Terminal Sawangan belum terbangun

2) Faktor Pendorong.

- a. Adanya penyusunan Masterplan Transportasi (rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan)
- b. Adanya kajian redesain simpang sebagai dasar pembangunan simpang-simpang oleh Dinas Rumkim dan PUPR
- c. Pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika oleh Provinsi Jawa Barat.
- d. Adanya peningkatan jalan di beberapa ruas jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.
- e. Dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di beberapa ruas jalan
- f. Adanya kajian *park and ride*.
- g. Adanya bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementerian Perhubungan)
- h. Adanya anggaran untuk sosialisasi Tertib Lalu Lintas dan penertiban parkir liar.
- i. Adanya pengembangan infrastruktur dan teknologi (ATCS) untuk pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang dapat mengatur siklus tundaan dan antrian secara adaptif.
- j. Adanya Kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC.
- k. Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dan kajian teknis angkutan masal
 - Telah beroperasinya LRT Harjamukti dengan feeder pendukungnya yaitu D11.
 - Telah terimplementasinya program *Buy The Service*
 - Telah disusun DED Pembangunan terminal Sawangan.
- l. Adanya kajian Rerouting Trayek untuk menata kembali trayek- trayek.
- m. Telah diusulkan pembentukan UPT baru untuk pengembangan transportasi massal (subsidi BTS)
- n. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas

Perhubungan ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Depok yang juga merupakan Visi Misi Pemerintah Kota Depok yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Depok Maju”

Sebagaimana penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Depok Maju” dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia secara Inklusif
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan
3. Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi
4. Peningkatan Transpormasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Secara operasional, visi "Bersama Depok Maju" dijabarkan ke dalam empat aspek utama:

1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia secara inklusif:
 - a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana prasarana pelayanan Kesehatan;
 - c. Terwujudnya kehidupan keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera;
 - d. Meningkatnya kohesi sosial masyarakat.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan:
 - a. Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah;
 - b. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana Daerah dan Krisis Iklim;
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - d. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan.
3. Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - b. Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi;
 - c. Menurunnya angka pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
 - d. Menurunnya tingkat kemiskinan.

4. Transformasi Pelayanan Publik:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital;
- b. Meningkatnya pengembangan kerjasama lintas sektor di tingkat lokal, regional, nasional, dan Internasional;

Dinas Perhubungan Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berada pada Misi ke II, yaitu *Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan*.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan misi kedua, Dinas Perhubungan Kota Depok telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2025-2029, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN TAHUN 2026
Percepatan Pembangunan Infastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Kecepatan Rata-rata	70 (Poin)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	61 (Poin)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi. Uraian Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS PERHBUNGAN				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	17 Laporan	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase administrasi keuangan tepat waktu</i>	100%	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	113 Orang	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 kali	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</i>	100%	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	

2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	-	-	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100%	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	

2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	63 Unit	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi</i>	100%	
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	60.59%	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	221 Unit	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	10 Unit	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	38 Unit	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM</i>	100%	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Laporan	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase titik kemacetan yang tertangani</i>	60.38 %	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	

2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Load Factor</i>	32%	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	15 Unit	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Rasio Ijin Trayek</i>	0.0014	
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	12 Unit	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Orang yang Melalui Terminal Setiap Tahun</i>	5.500.000 Orang	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	1 Unit	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	60.59 %	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	600 Unit	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	5.800 Unit	

2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum</i>	95 %	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	23 Unit	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1 Dokumen	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	11 Unit	
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	12 Laporan	
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1 Laporan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2026 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan uraian Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dishub Kota Depok Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2026 (Tahun Rencana)							CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						APBD Kota	APBD Prov	APBN/ Hibah					
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS PERHUBUNGAN										
2	15	01			23,682,817,796.00						24,393,302,356.00		
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	55,711,400.00				100%	57,382,769.00
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 Dokumen	38,591,200.00	√		2 Dokumen	39,748,963.00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	17 Laporan	17,120,200.00	√		17 Laporan	17,633,806.00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan tepat waktu</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	20,226,687,896.00				20,833,488,532.00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	113 Orang	20,207,354,096.00	√		113 Orang	20,813,574,718.00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	18 Laporan	19,333,800.00	√		18 Laporan	19,913,814.00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	471,550,000.00				485,696,500.00

2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 Paket	441,950,000.00	√				1 Paket	455,208,500.00
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	250 Orang	29,600,000.00	√				-	30,488,000.00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	878,815,500.00						905,179,965.00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Paket	10,806,700.00	√				1 Paket	11,130,901.00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5 Paket	66,764,000.00	√				2 Paket	68,766,920.00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Paket	31,454,800.00	√				1 Paket	32,398,444.00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	4 Paket	182,752,000.00	√				4 Paket	188,234,560.00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Paket	24,040,000.00	√				1 Paket	24,761,200.00
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	3 Dokumen	103,250,000.00	√				1 Dokumen	106,347,500.00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	338,074,000.00	√				12 Laporan	348,216,220.00
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Dokumen	121,674,000.00	√				1 Dokumen	125,324,220.00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	-	211,613,000.00						217,961,390.00
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	21 Unit	211,613,000.00	√				-	217,961,390.00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	1,306,540.00						1,345,736,200.00

2	15	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	610,000,000.00	√			12 Laporan	628,300,000.00
2	15	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	696,540,000.00	√			12 Laporan	717,436,200.00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	531,900,000.00					547,857,000.00
2	15	01	2.09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	63 Unit	214,500,000.00	√			63 Unit	220,935,000.00
2	15	01	2.09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	25 Unit	55,430,000.00	√			25 Unit	57,092,900.00
2	15	01	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	3 Unit	261,970,000.00	√			3 Unit	269,829,100.00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				79,167,457,908.80					81,446,151,358.00
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	200,000,000.00					206,000,000.00
2	15	02	2.01	000 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 Dokumen	200,000,000.00	√			5 Dokumen	206,000,000.00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	60.59%	3,497,652,800.00					3,602,582,384.00
2	15	02	2.02	000 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	221 Unit	1,318,987,000.00	√			190 Unit	1,358,556,610.00
2	15	02	2.02	000 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	10 Unit	143,475,000.00	√			10 Unit	147,779,250.00
2	15	02	2.02	000 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	38 Unit	2,035,190,800.00	√			23 Unit	2,096,246,524.00

2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100%	329,260,000.00						339,137,800.00	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	10 Laporan	329,260,000.00	√				12 Laporan	339,137,800.00	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase titik kemacetan yang tertangani</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	60.38 %	12,649,500,800.00						13,028,985,824.00	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	12,633,864,000.00	√				12 Laporan	13,012,879,920.00	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 Laporan	15,636,800.00	√				3 Laporan	16,105,904.00	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Load Factor</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	32%	20,485,921,858.80						21,100,499,513.00	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	155,048,000.00	√				12 Laporan	159,699,440.00	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	15 Unit	20,330,873,858.80	√				15 Unit	20,940,800,073.00	

2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rasio Ijin Trayek</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	0.0014	377,200,000.00					388,516,000.00	
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	200,000,000.00	√			12 Laporan	206,000,000.00	
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Unit	177,200,000.00	√			12 Unit	182,516,000.00	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah Orang yang Melalui Terminal Setiap Tahun</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5.500.000 Orang	4,151,017,000.00					4,275,547,510.00	
2	15	02	2.03	0001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Unit	4,151,017,000.00	√			1 Unit	4,275,547,510.00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	60.59 %	35,746,591,850.00					36,818,989,760.00	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	600 Unit	9,043,302,000.00	√			600 Unit	9,314,601,060.00	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5.800 Unit	26,703,289,850.00	√			5800 Unit	27,504,388,700.00	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	95 %	1,730,313,600.00					1,685,892,567.00	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	23 Unit	243,522,200.00	√			5 Unit	250,827,866.00	

2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Dokumen	243,522,200.00	√				1 Dokumen	154,497,425.00	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	11 Unit	210,400,000.00	√				13 Unit	216,712,000.00	
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	952,869,200.00	√				12 Laporan	981,455,276.00	
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Laporan	80,000,000.00	√				1 Laporan	82,400,000.00	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Depok untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini merupakan penjabaran dari tahun pertama Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam rangka mengupayakan keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada Tahun 2026.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka diperlukan pelaksanaan program yang kegiatan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta melaporkan pencapaiannya secara berkala dan berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.